



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

2024

**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANAH LAUT**

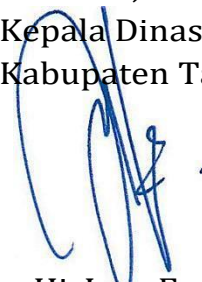
KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia- Nya Sehingga Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang – Undang RI 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 Ayat (1) Mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sebagaimana diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah.

Dalam Rangka memenuhi maksud ketentuan diatas, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut telah menyusun bahan LPPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024. Laporan ini sebagai bahan evaluasi terhadap Penyelenggaraan urusan wajib dan pelayanan dasar bidang kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, sehingga kedepan diharapkan akan terwujud peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah secara lebih efektif dan edisien.

Semoga upaya kita mendapat Rahmat, Hidayah dan Ridha Nya. Aamiin.

Pelaihari, 20 Januari 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanah Laut



dr. Hj. Isna Farida, M.Kes
NIP. 19740612 200501 2 016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISIii

DAFTAR TABEL..... iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.1.1 Penjelasan Umum 1

 1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah 14

 1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal..... 17

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN 20

 PEMERINTAHAN DAERAH.....

 2.1 Capaian Kinerja Makro 20

 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan . 23

 2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran 23

 2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil 35

 2.3 Akuntabilitas Kinerja Organisasi..... 42

 2.3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)..... 48

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS

 PEMBANTUAN 51

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN

 MINIMAL..... 56

 4.2 Bidang Urusan Kesehatan 56

 4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar 56

 4.1.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah..... 58

 4.1.3 Realisasi..... 64

 4.1.4 Alokasi Anggaran 77

 4.1.5 Dukungan Personil..... 79

 4.1.6 Permasalahan dan Solusi 80

BAB V PENUTUP..... 81

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sebaran Penduduk per Kecamatan Tahun 2024 6

Tabel 1.2 Daftar Nama Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut Beserta Jumlah Desa/Kelurahan Dan Luas Wilyah 7

Tabel 1.3 Daftar Perangkat Daerah SKPD Dinas Kesehatan 8

Tabel 1.4 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 12

Tabel 1. 5 Prioritas Pembangunan Daerah..... 14

Tabel 1.6 Hubungan Tujuan, Sasaran Pembangunan Daerah..... 15

Tabel 1.7 Perangkat Daerah SKPD Dinas Kesehatan Pengampu SPM di Kabupaten Tanah Laut..... 18

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Makro..... 19

Tabel 2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran Dinas Kesehatan..... 20

Tabel 2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil 27

Tabel 2.4 Target dan Realisasi Sasaran Strategis Dinas Kesehatan..... 32

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama..... 38

Tabel 3.1 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024..... 41

Tabel 4.1 Jenis Pelayanan Dasar SPM pada Bidang Kesehatan Tahun 2024...45

Tabel 4.2 Target Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tahun 2024 47

Tabel 4.3 Target Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Tahun 2024..... 47

Tabel 4.4 Target Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Tahun 2024..... 47

Tabel 4.5 Target Pelayanan Kesehatan Balita Tahun 2024..... 48

Tabel 4.6 Target Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar Tahun 2024. 48

Tabel 4.7 Target Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Tahun 2024 49

Tabel 4.8 Target Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Tahun 2024 49

Tabel 4.9 Target Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Tahun 2024 50

Tabel 4.10 Target Pelayanan Kesehatan Penderita DM Tahun 2024 50

Tabel 4.11 Target Pelayanan Kesehatan ODGJ Tahun 2024 51

Tabel 4.12 Target Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB Tahun 2024..... 51

Tabel 4.13 Target Pelayanan Kesehatan Terinfeksi HIV Tahun 2024..... 52

Tabel 4.14 Pencapaian SPM Usia Lanjut 52

Tabel 4.15 Pencapaian SPM Hipertensi..... 53

Tabel 4.16 Pencapaian SPM DM 54

Tabel 4.17 Pencapaian SPM ODGJ 55

Tabel 4.18 Pencapaian SPM TB..... 56

Tabel 4.19 Pencapaian SPM HIV..... 57

Tabel 4.20 Pencapaian SPM IBU Hamil..... 58

Tabel 4.21 Pencapaian SPM Bayi Baru Lahir..... 59

Tabel 4.22 Pencapaian SPM Ibu Bersalin 60

Tabel 4.23 Pencapaian SPM Pelayanan Balita..... 61

Tabel 4.24 Pencapaian SPM Usia Produktif..... 62

Tabel 4.25 Pencapaian SPM Usia Pendidikan Dasar 63

Tabel 4.26 Alokasi Anggaran SPM Urusan Bidang Kesehatan Tahun 2024..... 64

Tabel 4.27 Dukungan Personil Puskesmas..... 65

Tabel 4.28 Permasalahan dan Solusi Pencapaian SPM 65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang – Undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Tanah Laut dibentuk dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan. Berdasarkan peraturan tersebut Kabupaten Tanah Laut berkedudukan di Pelaihari dan terdiri dari 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Pelaihari, Jorong, Bati-Bati, Kurau dan Takisung.

Pada era desentralisasi dengan diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2000 berdasarkan UU Nomor 22 tahun 1999, diperbaharui dengan UU Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, maka beberapa peran pemerintah pusat dialihkan kepada pemerintah Daerah sebagai kewenangan wajib dan tugas pembantuan, salah satunya bidang pelayanan kesehatan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu unit kerja yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut berdasar Peraturan Bupati Tanah Laut No. 24 Tahun 2009.

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan maka perlu Mengevaluasi tugas pokok tersebut dalam bentuk laporan pertanggungjawaban Dinas Kesehatan (LKPJ) dimana dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD.

b. Data Geografis Wilayah

Secara geografis, letak wilayah Kabupaten Tanah Laut yang beribukota Pelaihari berada di bagian selatan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan posisi 114°30'20" - 115°20'00" Bujur Timur dan 3°30' 33" - 4°10' 30" Lintang Selatan.

Kabupaten Tanah Laut memiliki luas wilayah daratan mencapai 3.631,35 km² (363.135 Ha) atau 9,17% dari luas wilayah Kalsel. Luas tersebut belum termasuk luas zona perairan laut, sepanjang 3 mil dari garis pantai pada saat pasang tertinggi sepanjang 200 km. Bila luas daratan Kabupaten Tanah Laut ditambah dengan luas zona perairan lautnya, maka luas total luas wilayah menjadi 449.730 Ha atau 4.497,3 km². Adapun batas administrasi dapat diuraikan sebagai berikut :

- Utara : Kota Banjarbaru
- Selatan : Laut Jawa
- Timur : Kabupaten Tanah Bumbu
- Barat : Laut Jawa

Ditinjau dari segi topografinya, wilayah Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh dataran rendah yang landai, yang membentang dari Barat ke Timur, mulai dari arah Selatan (Pantai Laut Jawa) ke arah Utara (pedalaman), dan bergelombang hingga bergunung didaerah pedalaman yang berbatas dengan Kabupaten Banjar. Secara umum dapat dikatakan bahwa topografi wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat di bagi atas 2 (dua) bagian besar, yaitu:

1. Bagian selatan merupakan dataran rendah yang landai hingga berombak. Bentangan daerah ini memanjang dari Timur ke Barat dengan lebih melebar di bagian Barat yang terdiri dari rawa-rawa dan daerah aliran sungai, muara sungai dan Pantai Laut Jawa.
2. Bagian utara, merupakan daerah yang bergelombang, berbukit dan bergunung sampai ke perbatasan dengan Kabupaten Banjar. Pada wilayah ini terdapat beberapa puncak, yaitu:
 - Puncak gunung Kemuning (750 m dpl)
 - Puncak Gunung Batu Karo (621 m dpl)
 - Puncak Gunung Batu Balerang (921 m dpl)
 - Puncak Gunung Kematian (951 m dpl)
 - Puncak Gunung Batu Mandi (901 m dpl)
 - Puncak Gunung Sekupang (1.051 m dpl)
 - Puncak Gunung Haur Bonak (744 m dpl)
 - Puncak Gunung Aur Bunek (1.150 m dpl)
 - Puncak Gunung Condong (553 m dpl)

Dilihat dari sudut ketinggian tempat (elevasi), wilayah Kabupaten Tanah Laut dibagi 6 (enam) kelas elevasi , yaitu kelas 0 – 7 meter, 7 - 25 meter, 25 - 100 meter, 100 - 500 meter, 500 – 1000 meter dan diatas 1000 meter.

Kelas ketinggian (elevasi) lahan yang paling luas di Kabupaten Tanah Laut adalah kelas elevasi 0 - 7 meter dpl, yaitu mencapai 58.240 Ha (15.6 % dari luas daratan). Sedangkan kelas ketinggian yang paling kecil luasnya adalah kelas elevasi di atas 1.000 meter dpl, yaitu 13.661 Ha (3,7% dari luas daratan). Kelas elevasi ketinggian 0-7 meter dpl terdapat di seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Tambang Ulang sedangkan kelas elevasi ketinggian di atas 500 meter terdapat di Kecamatan Kintap, Jorong, Pelaihari dan Bati-Bati.

Kemudian kemiringan/kelerengan suatu lahan berkaitan dengan kepekaan tanah terhadap erosi tanah, Semakin tinggi/terjal lerengnya semakin peka tanah terhadap erosi. Bila dilihat dari kemiringan tanahnya, wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat dibedakan dalam 6 (enam) kelompok, yaitu sebagai berikut :

1. 0 – 3 %, sebagian besar tersebar di wilayah Timur membentang dari bagian Barat hingga Timur, mulai dari Selatan (pantai) ke Utara (pedalaman) dengan luas 250.460 Ha (67,16 % dari luas total daratan)
2. 3 – 8 %, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 44.830 Ha (12,02 % dari luas total daratan).
3. 8 – 15 %, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 31.600 Ha (8,47 % dari luas total daratan)
4. 15 – 25 %, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 21.805 Ha (5,85 % dari luas total daratan)
5. 25 – 40 %, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah dan Utara, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 10.690 Ha (2,87 % dari luas total daratan)
6. 40 %, sebagian besar tersebar di wilayah bagian Tengah dan Utara, membentang dari bagian Barat hingga Timur, dengan luas 13.545 Ha (3,63 % dari luas total daratan)

Wilayah Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh kelas lereng 0 – 3% yaitu sebesar 67,16% dari luas total wilayah daratan. Kelas lereng tersebut selain potensial untuk tanaman pangan lahan basah (padi sawah) berpotensi juga untuk perikanan tambak bagi wilayah yang ada di sepanjang pantai.

Berdasarkan tinjauan terhadap peta geologi Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Tanah Laut berumur antara mesozoik, tersier dan kuartar. Secara fisiografis Kabupaten Tanah Laut terletak di bagian ujung Barat Daya Pegunungan Meratus dan dibagian Selatan Cekungan Barito dan Anak Cekungan Asam-Asam. Pegunungan Meratus terutama ditempati oleh batuan pratersier, sedangkan Cekungan Barito dan Anak Cekungan Asam-Asam ditempati oleh batuan sediment tersier.

Morfologi wilayah di Kabupaten Tanah Laut dapat dibagi menjadi 4 (empat) satuan morfologi yaitu satuan morfologi dataran, dataran bergelombang, perbukitan dan pegunungan. Satuan morfologi dataran menempati bagian ujung Selatan dan ujung Barat. Ketinggian berkisar antara 0 – 10 m dpl. Satuan ini berupa endapan alluvium rawa dan pantai yang tersusun dari batuan sediment kuartar. Satuan Morfologi Dataran Bergelombang menempati bagian Barat dan Selatan, yaitu sekitar jalur jalan raya Bati-bati, Pelaihari, Asam-asam, Pelaihari – Batakan dan Pelaihari – Takisung.

Ketinggian berkisar antara 10 – 50 m dpl. Satuan ini tersusun oleh batuan sediment kuartar dan tersier. Satuan Morfologi Perbukitan menempati bagian tengah merupakan kaki dari Pegunungan Meratus. Ketinggian berkisar antara 50 – 250 m dpl. Satuan ini tersusun oleh batuan metamorf dan sediment serta sebagian kecil batuan beku. Satuan Morfologi Pegunungan menempati bagian Utara, dicirikan oleh lereng yang terjal dengan ketinggian puncak lebih dari 250 m dpl. Beberapa puncaknya seperti Gunung Kematian (951 m dpl), Gunung Batu Belerang (921 m dpl), Gunung Batu Karo (621 m dpl).

Jenis Tanah yang ada di Wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah jenis tanah podsolik, latosol, alluvial dan gleisol. Yang mendominasi wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah jenis tanah Alluvial, Podsolik dan Latosol. Sedangkan jenis tanah Gleisol hanya sebagian kecil saja, dan tersebar di 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Kurau, Bati-Bati, Takisung, Tambang Ulang, Pelaihari dan Panyipatan.

1. Jenis tanah latosol memiliki solum tanah tebal sampai sangat tebal, kandungan bahan organik 3 – 9 %, pH tanah antara 4,5 – 6,5 yaitu dari masam sampai agak masam, struktur tanahnya lemah dan konsistennya gembur. Secara keseluruhan tanah ini mempunyai sifat fisika dan sifat kimia yang baik, sehingga produktivitas lahannya sedang sampai tinggi, menempati areal seluas 108.780 Ha (29,17 % dari luas daratan seluruhnya).
2. Jenis tanah Alluvial disebut juga sebagai tubuh tanah endapan, kandungan bahan organiknya rendah, reaksi tanahnya masam sampai netral, struktur tanahnya pejal atau tanpa struktur dan konsistensinya keras waktu kering, teguh waktu lembab, kandungan unsure haranya relative kaya dan banyak tergantung pada bahan induknya. Secara keseluruhan tanah alluvial mempunyai sifat fisika kurang baik sampai sedang, sifat kimia sedang sampai baik, sehingga produktivitas tanahnya sedang sampai tinggi, menempati areal seluas 120.290 Ha (32,26 % dari luas lautan).
3. Jenis tanah podsolik memiliki solum tanah yang paling tebal yaitu 90 – 180 cm, tekstur tanahnya lempung berliat hingga liat, konsistensinya gembur di bagian atas dan teguh di lapisan bawah, kandungan bahan organiknya kurang dari 5 %, kandungan unsur hara tanaman rendah, reaksi tanah (pH) sangat masam sampai sangat masam yaitu 4 – 5,5. Secara keseluruhan tanah ini memiliki sifat kimia kurang baik, sifat fisika tidak mantap karena sifat agregatnya kurang baik, sehingga mudah terkena erosi. Produktivitasnya adalah rendah sampai sedang, menempati areal satuan 123.010 Ha (32,98% dari total daratan).

Wilayah Kabupaten Tanah Laut memiliki tekstur tanah dengan klasifikasi yaitu tekstur halus (lempung berliat hingga liat), tekstur sedang (lempung sampai lempung liat berdebu) dan tekstur kasar (lempung berpasir sampai berkerikil). Tekstur tanah akan berpengaruh terhadap kesuburan fisik tanah, kemampuan menyerap dan menyimpan air dan kepekaan terhadap erosi.

Umumnya tanah di Kabupaten Tanah Laut bertekstur sedang yang meliputi jenis tanah alluvial, latosol dan podsolik yaitu 297.285 Ha (79,91 % dari luas total daratan), tanah bertekstur halus meliputi jenis tanah gleisol dan podsonik seluas 46.750 Ha (12.54 % dari luas

total daratan) dan tanah yang bertekstur kasar meliputi jenis tanah alluvial seluas 28.915 Ha (7.75 % dari luas total daratan). Dengan demikian, di Kabupaten Tanah laut sedikitnya terdapat 28.915 Ha (7.75% dari luas total daratan) mempunyai kendala dalam pengembangan kawasan budidaya dengan faktor pembatas tekstur tanah yang kasar.

Kedalaman efektif tanah di wilayah Kabupaten Tanah Laut di klasifikasikan kedalam 4 (empat) kelas kedalaman efektif tanah yaitu dalam (lebih dari 90 cm) sedang (80 – 90 cm), dangkal (30 – 60 cm) dan sangat dangkal (kurang dari 30 cm). Kedalaman efektif tanah akan berpengaruh terhadap wilayah perakaran tanaman, jenis tanaman/tumbuhan dan tegakan tanaman.

Kabupaten Tanah Laut termasuk daerah beriklim tropis basah karena tidak terdapat perbedaan musim yang jelas. Hujan turun merata sepanjang tahun dengan bulan-bulan relatif basah antara Bulan Desember – Februari dan bulan-bulan relatif kering antara bulan Juni – Agustus. Berdasarkan hasil penelitian antara 1915 – 1941, curah hujan bagian Timur/pantai sebesar 2,324 mm/tahun dengan rata-rata hari hujan 150 hari/tahun dan di bagian Barat sampai dengan perbatasan kabupaten. Curah hujan berkisar antara 2.500 – 3.000 mm/tahun dan di wilayah Timur berkisar antara 2.000 – 2.500 mm/tahun.

Data curah hujan rata-rata bulanan dan perhitungan evapotranspirasi bulanan menyebabkan Kabupaten Tanah laut setiap bulannya tidak mengalami kekurangan air. Tanaman tahunan tidak memerlukan adanya air irigasi pada bulan-bulan yang *water balance* nya kurang dari 100 mm akan mengalami kekurangan air.

Di Kabupaten Tanah Laut keadaan hidrologi atau sumber daya air dapat dikelompokkan atas 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Sungai atau Danau : Keadaan hidrologi sungai dan danau sebagai sumber daya air permukaan di Kabupaten Tanah Laut atas sungai-sungai besar dan kecil yang bermuara di Laut Jawa. Sungai-sungai besar antara lain Sungai Maluka (640 Km²), Sungai Tabanio (770 Km²), Sungai Sabuhur (190 Km²), Sungai Swarangan (580 Km²). Fungsi-fungsi sungai tersebut adalah untuk sumber air minum, pengairan, usaha perikanan dan sebagai sarana transportasi antara daerah/daerah timur dengan daerah-daerah Barat di Kabupaten Tanah Laut. Adapun danau-

danau (rawa) yang terdapat di Kabupaten Tanah Laut yaitu Rawa Benua Raya (6.600 Ha), Rawa Panjaratan (2.500 Ha) dan Rawa Sanipah (5.600 Ha). Pada musiman hujan terdapat wilayah yang terkena banjir, baik terus menerus tergenang maupun tergenang secara periodik. Wilayah yang selalu tergenang adalah daerah Benua Raya dan Panjaratan.

2. Air Tanah : Kedalaman air tanah di suatu wilayah antara lain ditentukan oleh tinggi wilayah dari permukaan laut, jenis batuan induk dan sebagainya. Wilayah Kabupaten Tanah Laut tersusun dari batuan induk yang bervariasi dan terletak paa ketinggian 0–1000 m dpl. Oleh sebab itu kedalaman air tanahnya kan bervariasi, dari dangkal (daerah pantai hingga perbukitan dan pegunungan).

c. Jumlah Penduduk

Dilihat dari aspeknya penduduk mempunyai hubungan timbal balik dengan pembangunan. Penduduk Kabupaten Tanah Laut berperan sebagai subyek dan obyek dari pembangunan itu sendiri. Sebagai subyek pembangunan, maka penduduk dibina dan dikembangkan agar mampu menjadi penggerak pembangunan. Sebaliknya sebagai obyek pembangunan, penduduk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dan menerima segala konsekuensi dari pelaksanaan pembangunan tersebut.

Adapun jumlah Penduduk Tanah Laut Semester II Tahun 2024 (data hasil Disdukcapil Tanah Laut adalah 369.818 jiwa yang terdiri dari 187.908 laki-laki dan 181.910 perempuan dan masih tampak bahwa penyebaran Penduduk masih bertumpu di Kecamatan Pelaihari dengan jumlah penduduk 82.576 jiwa kemudian diikuti Kecamatan Bati-bati 46.889 jiwa dan Kecamatan Kintap 44.782, Sedangkan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Bumi Makmur dengan jumlah penduduk 14.438 jiwa.

Tabel 1.1 Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sebaran Penduduk per Kecamatan Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin		
		Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	Takisung	17.430	16.880	34.310
2	Jorong	18.673	17.784	36.457
3	Pelaihari	41.565	41.011	82.576

4	Kurau	7.431	7.334	14.765
5	Bati Bati	23.892	22.997	46.889
6	Panyipatan	13.371	13.068	26.255
7	Kintap	23.115	21.941	44.782
8	Tambang Ulang	9.795	9.523	19.192
9	Batu Ampar	14.880	14.170	28.869
10	Bajuin	10.404	9.982	20.149
11	Bumi Makmur	7.352	7.220	14.438
JUMLAH		187.908	181.910	369.818

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Pada saat ini Kabupaten Tanah Laut terbagi dalam 11 (sebelas) kecamatan, 135 (seratus tiga puluh lima) desa dan 5 (lima) kelurahan. Dalam tabel 1.2 berikut ini di sampaikan secara terperinci jumlah kecamatan beserta desa/kelurahan dan luas wilayah masing.

**Tabel 1.2 Daftar Nama Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut
Beserta Jumlah Desa/Kelurahan Dan Luas Wilyah**

No	Kecamatan	Ibu Kota	Jumlah Kelurahan/ Desa	Luas wilayah (km ²)	Persentase Luas Kecamatan dengan Luas Kabupaten
1	Panyipatan	Panyipatan	10	336,00	9,25
2	Takisung	Gunung Makmur	12	343,00	9,45
3	Kurau	Padang Luas	11	127,00	3,50
4	Bumi Makmur	Handil Babirik	11	141,00	3,88
5	Bati-Bati	Padang	14	234,75	6,46
6	Tambang Ulang	Tambang Ulang	9	160,75	4,43
7	Pelaihari	Pelaihari	20	379,45	10,45
8	Bajuin	Bajuin	9	196,30	5,41
9	Batu Ampar	Batu Ampar	14	548,10	15,09
10	Jorong	Jorong	11	628,00	17,29
11	Kintap	Kintapura	14	537,00	14,79
Jumlah			135	3.631,35	100

Sumber : Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka 2024 (Badan Pusat Statistik)

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

. Dalam tabel dibawah ini disampaikan secara terperinci jumlah perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah Lingkup Dinas Kesehatan di Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 1.3 Daftar Perangkat Daerah SKPD Dinas Kesehatan

No	Perangkat Daerah
1	Dinas Kesehatan
2	RSUD H. Boejasin Pelaihari
3	RSUD KH. Mansyur Kintap
4	UPT Instalasi Farmasi
5	UPT Laboratorium Kesehatan
6	UPT Puskesmas Pelaihari
7	UPT Puskesmas Asam-Asam
8	UPT Puskesmas Batakan
9	UPT Puskesmas Bati-Bati
10	UPT Puskesmas Jorong
11	UPT Puskesmas Kait-Kait
12	UPT Puskesmas Kintap
13	UPT Puskesmas Kurau
14	UPT Puskesmas Padang Luas
15	UPT Puskesmas Panyipatan
16	UPT Puskesmas Sungai Cuka
17	UPT Puskesmas Sungai Riam
18	UPT Puskesmas Tajau Pecah
19	UPT Puskesmas Takisung
20	UPT Puskesmas Tambang Ulang
21	UPT Puskesmas Tanjung Habulu
22	UPT Puskesmas Tirtajaya
23	UPT Puskesmas Angsau
24	UPT Puskesmas Bumi Makmur
25	UPT Puskesmas Durian Bungkok
26	UPT Puskesmas Bentok Kampung

Sumber : Umum dan Kepegawaian Dinkes Tala 2024

f. Gambaran Umum Dinas Kesehatan

1. Struktur Organisasi

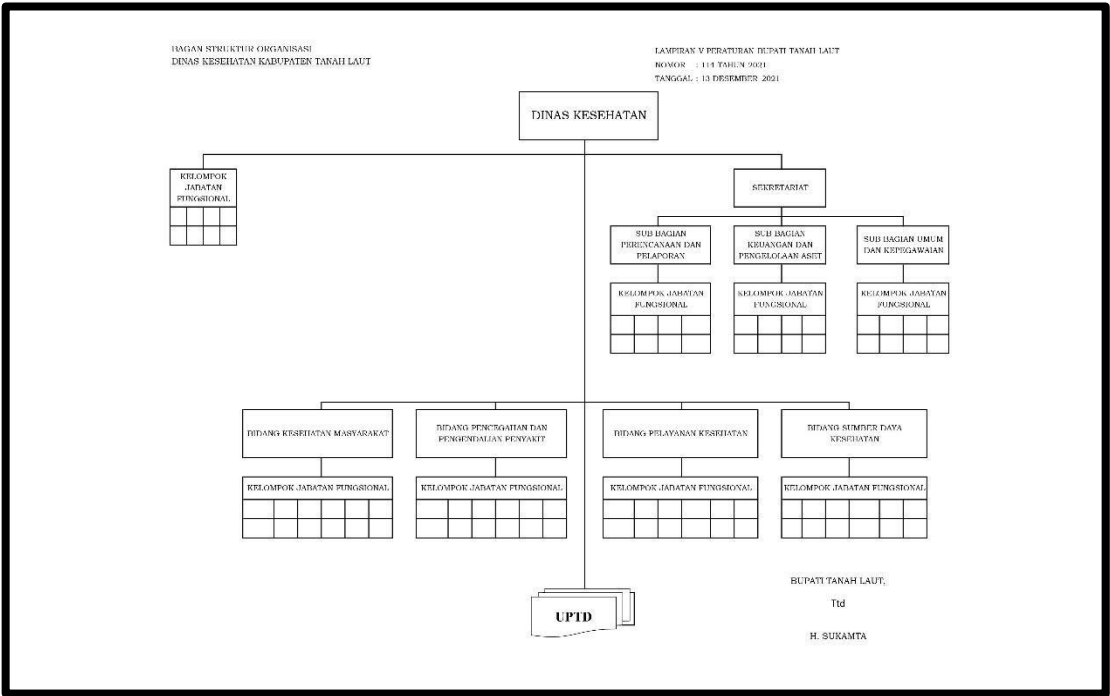
Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

Pembinaan umum dibidang kesehatan meliputi pendekatan peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif).

- a. Pembinaan teknis di bidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- b. Pembinaan Operasional sesuakebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

susunan organisasi dinas kesehatan kabupaten tanah laut sesuai dengan peraturan bupati kabupaten tanah laut nomor 114 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah kabupaten tanah laut

terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan, Bagian Sekretariat, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan, UPT Dinas Kesehatan dan kelompok Jabatan Fungsional (dapat dilihat pada bagan SOTK).



Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut.

1. Sekretariat terdiri dari.
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset.

- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 2. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari.
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat.
 - b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
- 3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari:
 - a. Seksi Surveilans dan Imunisasi.
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.
 - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- 4. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional.
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.
 - c. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.
- 5. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
 - b. Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- 6. UPT Dinas
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 1. Kepegawaian

Keberadaan sumber daya manusia kesehatan sebagai salah satu pendukung utama pelayanan kesehatan, dalam pelaksanaannya sangat mengutamakan pelayanan kesehatan baik melalui institusi puskesmas maupun yang langsung berhubungan dengan Dinas Kesehatan.

Tabel 1.1
JUMLAH PEGAWAI BERDASAR PENDIDIKAN, JABATAN
DAN GOLONGAN Tahun 2024

No	Nama Skpd	Jumlah Personil (Org)	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Personil (Org)	Gol	Jumlah Personil (Org)
1	Dinas Kesehatan	1.013	SD	2	I	1
			SLTP	0	II	179
			SLTA	20	III	648
			DI	2	IV	83
			DII	1	VII	55
			D3	568	IX	11
			D4/S1	287	X	33
			S2	133		
	Total			1.013		1.013

g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;\
5. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

f. Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 terdiri atas :

Pendapatan Asli Daerah :

- 1) Pajak Daerah
- 2) Retribusi Daerah
- 3) Penganggaran hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan Transfer :

Dana Perimbangan :

- a. Transfer Umum
 - 1) Dana Bagi Hasil (DBH)
 - 2) Dana Alokasi Umum (DAU)
- b. Dana Tranfer Khusus

- 1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
 - 2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
 - 3) Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus
 - 4) Dana Insentif Daerah
 - 5) Dana Keistimewaan
 - 6) Dana Desa
- Transfer Antar-Daerah :
- 1) Pendapatan Bagi Hasil
 - 2) Bantuan Keuangan
- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah :
- 1) Pendapatan Hibah
 - 2) Dana Dana Darurat
 - 3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
1) Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

Tabel 1. 4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

No .	Jenis Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Retribusi Daerah	78.932.426.502,00	79.695.108.248,78	100,97
2.	Lain- Lain PAD Yang Sah	21.327.714.217,00	19.452.741.445,60	91,21
	JUMLAH	100.260.140.719,00	99.147.849.694,38	98,89

Sumber : LRA pada aplikasi SIPD sampai dengan 31 Desember 2024

Secara keseluruhan anggaran **Rp. 100.260.140.719** terealisasi sebesar **Rp. 99.147.849.694,38** atau **98,89%**.

Capaian realisasi anggaran pendapatan daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut secara lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang sah. Alokasi Anggaran Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar Rp. **100.260.140.719,00** dengan realisasi sebesar Rp. 99.147.849.694,38 atau 98,89% dengan rincian:

1) Retribusi Daerah anggaran Rp. 78.932.826.502,00 terealisasi sebesar Rp. 79.695.108.248,78 atau 100,97%.

2) Lain-lain PAD yang Sah anggaran Rp.21.327.714.217,00 terealisasi sebesar Rp. 19.452.741.445,60 atau 91,21%.

2. Belanja Daerah

3. Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal Alokasi anggaran belanja daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar Rp.459.181.138.752,47 dengan Realisasi sebesar Rp.420.833.206.771 ,00 atau 91,65% Dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Operasi

- 1) Belanja Pegawai anggaran Rp.131.232.928.695,00 terealisasi sebesar Rp.126.418.953.134,00 atau 96,33%.
- 2) Belanja Barang dan Jasa anggaran Rp. 244.349.743.802,00 terealisasi sebesar Rp. 220.198.485.905 atau 90,12%.
- 3) Belanja Hibah anggaran sebesar Rp. 676.100.000,00 terealisasi sebesar Rp.559.832.115 atau 82,80%.

Belanja Modal

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin anggaran Rp.82.922.366.255,47 terealisasi sebesar Rp. 73.655.935.617 atau 88,83%
- 2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan anggaran Rp.15.877.891.687,00 terealisasi sebesar Rp. 13.446.434.302,00 atau 84,69%
- 3) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi anggaran Rp.7.794.078.752,00 terealisasi sebesar Rp. 6.620.190.149,00 atau 84,94%
- 4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya anggaran Rp.293.040.000,00 terealisasi sebesar Rp. 291.500.000 atau 99,47 %

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut

Permasalahan Dinas Kesehatan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Isu dan permasalahan mendesak yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah antara lain sebagai berikut:

- 1. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, permasalahan yang dihadapi meliputi:
 - Masih terjadi kasus kematian ibu di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 sebanyak 6 kasus kematian ibu dengan jumlah kelahiran hidup sebanyak 5053 orang,

sehingga ditemukan hasil AKI yaitu 118,7 per 100.000 kelahiran hidup. Hasil audit penyebab kematian ibu tersebut sebagian besar kematian ada di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan (Rumah Sakit). hal ini juga disebabkan adanya keterlambatan penanganan baik di fasilitas pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan, walaupun pengenalan tanda bahaya ibu di tingkat fasilitas kesehatan sudah diketahui lebih dini.

- Pada tahun 2024 jumlah absolut kematian bayi sebesar 64 kematian bayi dari 5.053 kelahiran hidup, yang berarti Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2024 sebesar 12,7 per 1000 kelahiran hidup. Angka ini menunjukkan terjadi kenaikan Angka Kematian Bayi dibandingkan tahun 2023 dimana AKB sebesar 10,2 per 1.000 kelahiran hidup. Target Renstra AKB Tanah Laut Tahun 2023 adalah sebesar 9,2 per 1000 kelahiran hidup yang artinya AKB tahun 2024 masih belum seperti yang diharapkan. Akan tetapi capaian AKB tahun 2024 sebesar sebesar 12,7 per 1.000 kelahiran hidup, masih dibawah angka target nasional (RPJMN) sebesar 16 per 1000 kelahiran hidup.
- Pada Tahun 2024 berdasarkan hasil SSGI, Prevalensi Stunting Kabupaten Tanah Laut sebesar 26,6 %. Sedangkan berdasarkan hasil EPPGM Pada tahun 2024 prevalensi stunting (TB/U) pada Balita sebesar 5,55 % dari target <16 % yaitu sebanyak 1535 orang Balita gizi stunting dari 27674 Balita yang terentry di EPPGBM. Prevalensi 2024 lebih tinggi daripada prevalensi stunting 2023 yaitu 4,90%
- Angka kesakitan tahun 2024 sebesar 12,89 % dimana angka tersebut diperoleh dari perhitungan jumlah penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan di bagi jumlah seluruh penduduk di kali 100 %, yang mana pada tahun 2024 penduduk Kabupaten tanah laut berjumlah 369.818 orang dari seluruh penduduk ada 47.633 Penduduk kabupaten Tanah Laut mempunyai keluhan Kesehatan

b. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan adalah ketersediaan sumber dana yang jumlahnya terbatas. Diantara pilihan-pilihan kebijakan yang ada sudah barang tentu ada hal-hal yang harus dipilih untuk dikedepankan sebagai prioritas, karena jika semuanya dilaksanakan dengan menggunakan dana yang ada dengan membagi secara merata, akan berpotensi target yang dicanangkan sulit untuk dicapai atau dengan kata lain sulit untuk melihat hasil yang riil dari pembangunan yang dilaksanakan. Berdasarkan analisa dan penelaahan terhadap Visi dan Misi RPJPD, RPD, Prioritas Nasional dan Provinsi, masukan dari forum konsultasi publik, serta isu dan kondisi riil terbaru maka dirumuskanlah hal yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2024. Prioritas pembangunan daerah tahun 2024 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun 2024 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJPD) tahun 2024-2026, yang keterhubungannya dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 1.5 Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJPD)	Sasaran
1	Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Keluarga, Masyarakat dan Lingkungan	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan
2	Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	

Sumber RPJPD Kabupaten Tanah Laut 2024

c. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah mendasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan.

Perencanaan pembangunan tahun 2024 ini merupakan tahun pertama dari tahapan RPD (Rencana Pembangunan Daerah). Perencanaan tahun 2024 dirumuskan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 berdasarkan kebijakan RPD untuk penentuan sasaran dan prioritas pembangunan daerah dengan memperhatikan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, juga memperhatikan prioritas nasional dalam RKP dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan.

1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam upaya mewujudkan visi, misi dan tujuan seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 maka sasaran daerah harus dijabarkan secara lebih rinci dan terukur untuk mempermudah operasional pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2024 disajikan di Tabel 1.6 berikut:

Tabel 1.6 Hubungan Tujuan, Sasaran Pembangunan Daerah

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Peningkatan layanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	Angka Harapan Hidup
			Cakupan Kinerja Pelayanan Kesehatan <i>On Call</i>

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Keberadaan Pemerintah Daerah dengan konsep otonominya pada dasarnya merupakan suatu perwujudan untuk mengefisienkan pelayanan pemerintahan pada konteks geografis dan demografis dalam luasan yang besar seperti negara Indonesia. Dengan memberikan sebagian kewenangan yang ada di Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah atau yang disebut desentralisasi, harapannya adalah bahwa pelayanan pemerintah kepada warganya semakin didekatkan dan

selanjutnya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dapat ditingkatkan secara terus menerus seiring dengan intensifnya interaksi antara warga dengan pemerintahnya.

Oleh karena itu untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan akses pelayanan yang dapat diberikan oleh pemerintah melalui pemerintah di daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, maka pelayanan yang diberikan bukan hanya pelayanan yang diorientasikan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, tetapi merupakan pelayanan dasar.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa diamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar tersebut selanjutnya ditetapkan melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Jika dilihat dalam konteks pembangunan nasional, maka percepatan penerapan SPM menjadi salah satu kebijakan prioritas nasional. Dalam hal ini SPM ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota dimana penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.

Pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar bagi Pemerintah Kabupaten/ Kota yang menjadi urusan wajib terdiri atas :

1. Pendidikan
- 2. Kesehatan**
3. Pekerjaan Umum
4. Perumahan Rakyat
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal tersebut, pemerintah daerah juga harus mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah serta target pencapaian pada setiap perangkat daerah pengampu SPM. Pengintegrasian ini menjadi penting agar ada kepastian bagi

Pemerintah Daerah untuk menerapkan dan mencapai target yang diharapkan sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2023 menjadikan penerapan SPM termasuk dalam isu strategis pembangunan Kabupaten Tanah Laut. Isu strategis kemudian menjadi arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

2. Kebijakan Umum

Menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 yang merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan, sebagai penjabaran dari tahun pertama Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024. KUA-APBD juga disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD tahun 2023 baik pada aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024, diprioritaskan dalam mencapai target-target pembangunan Kabupaten Tanah Laut

Tahun 2024, serta akan digunakan dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Harapan dari hal tersebut adalah agar pelaksanaan pembangunan pada tahun 2024 dapat semakin mengarah pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Laut, serta pada pencapaian visi Kabupaten Tanah Laut.

Prinsip dan kebijakan umum APBD adalah landasan filosofis untuk merumuskan kebijakan dan sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran, untuk dipedomani seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dalam rangka penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa SPM merupakan pelaksanaan atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. SPM disusun sebagai alat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak konstitusional rakyat untuk mendapatkannya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa Penerapan SPM menjadi sangat penting dan mendasar karena pada hakekatnya dengan melaksanakan SPM, maka basis untuk kesejahteraan masyarakat dapat terbangun setidaknya bila semua sasaran minimal dapat terwujud. Meskipun tidak semua program kegiatan menjadi kegiatan pelayanan yang termasuk dalam SPM, hanya beberapa kegiatan pokok saja yang merupakan pelayanan dasar yang wajib diberikan sesuai fungsi dan tugas pokoknya dari cakupan kegiatan masing - masing perangkat daerah. Dalam hal ini kegiatan merupakan bagian dari program dan kegiatan dari unit kerja yang akan dibiayai melalui APBD. Dengan demikian tiap jenis pelayanan dasar di tiap bidang SPM

menjadi satu atau menjadi bagian dari program atau kegiatan di masing-masing perangkat daerah.

Pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah terdiri dari 6 pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh 6 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.7 Perangkat Daerah SKPD Dinas Kesehatan
Pengampu SPM di Kabupaten Tanah Laut

NO	Perangkat Daerah	Pelayanan Dasar SPM
1	Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut	Bidang Kesehatan : 1. Pelayanan kesehatan ibu hamil 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 4. Pelayanan kesehatan balita 5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif 7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 11. Pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (TB) 12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Capaian Kinerja Makro

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Target 2024	Realisasi 2004	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
1	Angka Kematian Ibu	158	170	118,7	143
2	Angka Kematian Bayi	10,2	8	12,7	62,99
3	Prevalensi stunting	4,55	14	26,6	52,63
4	Angka Kesakitan	9,83	10	12,89	77,57

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran Dinas Kesehatan

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Hasil	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2	Kesehatan	1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, rasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	RSUD H. Boejasin Tempat Tidur NON COVID = 178 Tempat Tidur COVID = 7 RSUD KH. Mansyur Kintap Tempat Tidur NON COVID = 63 Tempat Tidur COVID = 0 RS Borneo Citra Medika Tempat Tidur NON COVID = 158 Tempat Tidur COVID = 2 RS Ibunda	Dinas Kesehatan	

						Tempat Tidur NON COVID = 40 Tempat Tidur COVID = 0 Puskesmas Tajau Pecah Tempat Tidur NON COVID = 10 Tempat Tidur COVID = 0 Puskesmas Kurau Tempat Tidur NON COVID = 7 Tempat Tidur COVID = 0 Puskesmas Panyipatan Tempat Tidur NON COVID = 5 Tempat Tidur COVID = 0 Puskesmas Kurau Tempat Tidur NON COVID = 7 Tempat Tidur COVID = 0 Klinik Mitra Sehat Tempat Tidur NON COVID = 8 Tempat Tidur COVID = 0 Klinik Utama Ammariz Tempat Tidur NON COVID = 10 Tempat Tidur COVID = 0 TOTAL Tempat Tidur NON COVID = 479 Tempat Tidur COVID = 9		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	1	Jumlah RS dan dipersiapkan akreditasinya	4 RS terakreditasi Paripurna	Dinas Kesehatan	
		3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1. Vaksin Tetanus difteri = 6.278 2. Table tambah darah = 4.713 3. Alat deteksi risiko ibu hamil=1.163 4. Kartu Ibu/rekam medis ibu=5.099 5. Buki Kesehatan Ibu dan Anak= 5.099	Dinas Kesehatan	
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	1. Dokter spesialis kebidanan = 5 orang 2. Bidan = 411 orang 3. Perawat = 537 orang	Dinas Kesehatan	
		4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1. Formulir partograf = 5.066 2. Kartu Ibu (F2KIA) = 5.099 3. Buku KIA = 5.099	Dinas Kesehatan	
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk	1. Dokter spesialis kebidanan = 5 orang 2. Bidan = 411 orang	Dinas Kesehatan	

					pelayanan persalinan sesuai standar	3. Perawat = 537 orang		
		5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1. Vaksinasi Hepatitis B0 = 4.990 2. Vitamin K1 Injeksi = 4.990 3. Salep/tetes mata antibiotik = 4.990 4. Formulir Bayi Baru Lahir = 4.990 5. Formulir MTBM = 4.990 6. Buku KIA = 4.990	Dinas Kesehatan	
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	1. Dokter spesialis Anak = 3 orang 2. Bidan = 411 orang 3. Perawat = 537 orang	Dinas Kesehatan	
		6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku = 25.424 2. Formulir DDTK = 25.424 3. Buku KIA = 25.424 4. Vitamin A Biru = 4.960	Dinas Kesehatan	

						5. Vitamin A Merah = 22.868 6. Vaksin Imunisasi Dasar=2.832 7. Vaksin Imunisasi Lanjutan=2.986 8. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai = 70.639 buah 9. Peralatan Anafilaktik = 66 buah		
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	1. Dokter= 79 orang 2. Bidan = 411 orang 3. Perawat = 537 orang 4. Ahli Gizi = 68 orang 5. Guru PAUD= 933 orang 6. Kader Kesehatan = 2.284 orang	Dinas Kesehatan	
				7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia 1. Buku Rapor Kesehatan=9.250 buah 2. Buku Pemantauan Kesehatan=9.250 buah 3. Kuisisioner Skrining Kesehatan=58.510 lembar 4. Formulis rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia	Dinas Kesehatan	

						sekolah dan remaja di dalam sekolah=53.855 buah 5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah=4.646 buah		
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	1. Dokter/Dokter Gigi=110 2. Bidan=411 3. Perawat=537 4. Ahli Gizi=68 5. Tenaga Kesehatan Masyarakat=39 6. Guru=6.590 7. Kader Kesehatan=2.284	Dinas Kesehatan	
		8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1. KIT IVA Tes = 22 Pcs 2. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)= 22 3. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)= 132.958	Dinas Kesehatan	

				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1. Dokter=79 orang 2. Bidan=411 orang 3. Perawat=537 orang 4. Ahli Gizi=68 orang 5. Tenaga kesehatan Masyarakat=39 orang 6. Tenaga Non kesehatan terlatih= 2.284 orang	Dinas Kesehatan	
		9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1. Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol=22 2. Instrumen <i>Geriatric Depression Scale (GDS)</i> , Instrumen <i>Abbreviated Mental Test (AMT)</i> , dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G) = 22 3. Buku Kesehatan Lansia = 11.378	Dinas Kesehatan	
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1. Dokter= 79 orang 2. Bidan = 411 orang 3. Perawat = 537 orang 4. Ahli Gizi = 68 orang 5. Tenaga Kesehatan Masyarakat=39	Dinas Kesehatan	

						6. Tenaga Non Kesehatan Terlatih=2284		
		10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1. Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)=1.030 buah 2. Tensimeter=22 buah 3. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) dan Aplikasi ASIK=22 buah	Dinas Kesehatan	
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1. Dokter=79 orang 2. Bidan=411 orang 3. Perawat=537 orang 4. Tenaga Kesehatan Masyarakat=39 orang	Dinas Kesehatan	
		11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1. Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet= 22 2. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)=1000 buah	Dinas Kesehatan	

						3. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) dan Aplikasi ASIK=1.368 buah		
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1. Dokter=79 orang 2. Bidan=411 orang 3. Perawat=537 orang 4. Ahli gizi=68 orang 5. Tenaga Kesehatan Masyarakat= 39 orang	Dinas Kesehatan	
		12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru=22 buah 2. Kit berisi 2 Alat Fiksasi=2 buah 3. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan=1.005 buah 4. Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)=22 buah	Dinas Kesehatan	

				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1. Dokter dan/atau perawat kesehatan jiwa dan/atau tenaga Kesehatan lainnya=22 orang	Dinas Kesehatan	
		13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1. Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (oil emersi, ether alcohol lampu spritus/bunsen, ose/lidi), rak pengering = 4.290 buah 2. Catridge tes cepat molekuler=4.290 buah 3. Formulir pencatatan dan pelaporan=25 buah 4. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)=23 buah 5. Reagen Zn TB = 100 buah 6. Maskes jenis rumah tangga dan Masker N95 = 100 buah	Dinas Kesehatan	
				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan	1. Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)= 76 orang 2. Penata Rontgen=14 orang	Dinas Kesehatan	

					sesuai tandar	3. Tenaga kesehatan non terlatih = 22 orang 4. Tenaga Kesehatan Masyarakat = 39 orang 5. Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru=79/3/1 orang 6. Perawat=537 orang		
		14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1. Tes cepat HIV = 8.737 buah 2. Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)=23 buah 3. Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK=23 buah 4. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai=2 buah	Dinas Kesehatan	

				2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1. Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin= 79/3/1 orang 2. Perawat=537 orang 3. Bidan=411 orang 4. Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)=76 orang 5. Tenaga kesehatan masyarakat=39 orang 6. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu = 2.284 orang	Dinas Kesehatan	
--	--	--	--	---	---	--	-----------------	--

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
Urusan Wajib							
2	Kesehatan	1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 622 $\frac{448}{369.818} \times 100$ Jumlah Penduduk di Kabupaten = 369.818 (Data penduduk Disdukcapil Tanah Laut semester 2 tahun 2024)	0,12 %	Dinkes	Rumah Sakit Daerah
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 4 Rumah Sakit $\frac{4}{4} \times 100$ Jumlah RS di Kabupaten = 4 Rumah Sakit	100 %	Dinkes	

		3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 4.371 $\frac{4.371}{6.257} \times 100$ Jumlah ibu hamil di Kabupaten = 6.257 (sasaran sk kadinkes)	69,86 %	Dinkes	
--	--	---	--	--	----------------	--------	--

		4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 5.053 $\frac{5.053}{6215} \times 100$ Jumlah ibu bersalin di Kabupaten = 6.215 (sasaran sk kadinkes)	81,3%	Dinkes Dinkes	
		5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 4.490 $\frac{4.490}{5.916} \times 100$	84,3 %	Dinkes	

				Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten = 5.916 (Jumlah Lahir Hidup)			
		6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 25.424 $\frac{25.42}{4} \times 100$ 30.045 Jumlah balita di Kabupaten = 30.045 (sasaran sk kadinkes)	84,6%	Dinkes	
		7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 58.681 $\frac{58.68}{1} \times 100$ 59.950 Jumlah anak usia pendidikan dasar di	97,88 %	Dinkes Disdukcapil	

				Kabupaten = 59.950 (data Pusdatin)			
		8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 132.958 $\frac{132.958}{243.550} \times 100$ Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten = 243.550 (data Pusdatin)	54,59 %	Dinkes Disdukcapil	
		9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 29.742 $\frac{29.742}{33.933} \times 100$ Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di Kabupaten = 33.933 (data Pusdatin)	87,65 %	Dinkes Disdukcapil	

		10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 25.204 $\frac{25.20}{27.96} \times 100$ Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten = 27.962 (sasaran sk kadinkes)	90,14 %	Dinkes	
		11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 4.287 $\frac{4.287}{4.287} \times 100$ Jumlah penderita DM di Kabupaten = 4.287 (sasaran sk kadinkes)	100%	Dinkes	

		12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan	100%	Dinkes	
--	--	----	--	--	-------------	--------	--

			layanan kesehatan jiwa sesuai standar	kesehatan sesuai standar = 510 $\frac{510}{510} \times 100$ Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten = 510 (sasaran sk kadinkes)			
		13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 3.693 $\frac{3.693}{4.679} \times 100$ Jumlah penderita TBC di Kabupaten = 4.679 (data penderita TBC)	78,9%	Dinkes	
		14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = 8.257 $\frac{8.257}{8.721} \times 100$	94,6%	Dinkes	

				Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten = 8721 (sasaran sk kadinkes)			
--	--	--	--	--	--	--	--

2.3 Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Instruksi Presiden RI No.7 Th 1999 tentang AKIP).

Sesuai kerangka konsep akuntansi pemerintahan, akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Berdasarkan uraian itu maka pernyataan tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut di atas dapat diartikan bahwa peningkatan status kesehatan masyarakat dan peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan harus terus selalu dilakukan secara berkesinambungan untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), prevalensi gizi stunting, meningkatkan indeks kepuasan masyarakat dan meningkatkan indeks keluarga sehat.

Untuk menggambarkan kinerja sasaran strategis target dan realisasinya di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dari Eselon II sampai dengan Eselon IV selama kurun waktu dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Target dan Realisasi Sasaran Strategis Dinas Kesehatan
Tahun 2023 dan 2024

Sasaran	Indikator Sasaran	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran pada Tahun ke						
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra
		2023			2024			2024
Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak serta gizi masyarakat	1. Persentase Ibu Hamil yang dilayani sesuai Standar	100%	77,7%	77,7%	100%	70,3%	70,3%	100%
	2. Persentase ibu bersalin yang dilayani sesuai Standar	100%	99,5%	99,5%	100%	99,7%	99,7%	100%
	3. Persentase Bayi Baru Lahir yang dilayani sesuai Standar	100%	89,4%	89,4%	100%	84,35%	84,35%	100%
	4. Persentase Balita yang mendapat pelayanan gizi sesuai Standar	100%	84,6%	84,6%	100%	84,6%	84,6%	100%
Meningkatnya Promosi kesehatan	1. Persentase Rumah	60%	99,8%	99,8%	60%	92,3%	92,3%	60%

dan pemberdayaan Masyarakat	Tangga berPHBS							
	2. Persentase Desa yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Kesehatan Lingkungan,	1. Persentase desa STBM	100%	100%	100%	100%	72%	72%	100%
	2. Persentase TTU yang memenuhi syarat Kesehatan	80%	57,14%	71,42%	80%	77%	77%	80%
	3. Persentase TPM yang memenuhi Syarat Kesehatan	70%	61,38%	87,68%	62%	34%	34%	70%
Meningkatnya Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja	100%	22,72%	22,72%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan	100%	22,72%	22,72%	100%	22,7%	22,7%	100%

	Kesehatan Olah Raga							
Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1. Persentase orang dengan penyakit Tidak Menular yang dilayani sesuai standar	100%	87,1%	87,1%	$\frac{234.46}{2}$	61.917	26,4%	100%
	2. Persentase Desa bebas KLB Penyakit Menular	100%	3 desa	2,22	100%	2 desa	1,48%	100%
	3. Persentase Desa Universal Child Immunization (UCI)	100%	114 desa UCI	84,44	100%	121 desa UCI	89,6	100%
Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	1. Persentase fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Utama	68%	73%	107%	100%	100%	100%	68%
	2. Persentase Pelayanan kegawat daruratan oleh Public	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Service Center (PSC)							
	3. Persentase Fasilitas Kesehatan yang berstatus BLUD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4. Persentase Jumlah Kelompok Asuhan Mandiri Tanan Obat Keluarga (Asman TOGA) di Desa.	56%	100%	178,6%	56%	100%	100%	56%
	5. Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta JKN	100%	94,51%	94,5%	95%	99,91%	99,91%	100%
Meningkatkan Fasilitas Pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai Standar.	80%	80%	100,0%	70%	70,71%	70,71%	80%
	2. Persentase Puskesmas dengan alat Kesehatan yang standar	100%	55,42%	55,4%	70%	53%	53%	100%

	3. Persentase obat dan BMHP yang sesuai Formulairu m Nasional	100%	90%	90,0%	95%	98%	98%	100%
	1. persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar	100%	100%	100,0%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya pelayanan administrasi dan Dukungan Operasional Perkantoran	1. Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik dan sesuai aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase Sarana Prasarana Perkantoran sesuai standar	100%	100%	100,0%	100%	100%	100%	100%
	3. Persentase Pelayanan Kepegawaia n sesuai aturan	100%	100%	100,0%	100%	100%	100%	100%
	4. Persentase Pencatatan	100%	100%	100,0%	100%	100%	100%	100%

	dan Pelaporan Keuangan sesuai standar							
	5. Persentase Pencatatan aset sesuai standar	100%	100%	100,0%	100%	100%	100%	100%
	6. Nilai Laporan Akuntabilita s kinerja Pemerintah (LAKIP)	74	81,45	110,14	81,50	81,50	100%	82

2.3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Indikator kinerja utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan strategis. Penetapan IKU dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. IKU Dinas Kesehatan berjumlah 5 indikator. IKU ini digunakan untuk mengukur keberhasilan Tujuan strategis yang merupakan Tugas dan Fungsi Bidang Kesehatan

IKU Dinas Kesehatan merupakan Tujuan yang paling utama dari semua program dan kegiatan bidang kesehatan yaitu:

1. Meningkatkan status kesehatan masyarakat dengan Indikator sebagai berikut:
 - a. Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup
 - b. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup
 - c. Prevalensi Stunting
 - d. Angka Kesakitan
2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan dengan Indikator sebagai berikut:
 - a. Indeks Keluarga Sehat
 - b. Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab/ Sumber Data
1	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	1 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	Jumlah kematian ibu dibagi jumlah lahir hidup dikali 100.000	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
		2 Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	Kematian bayi dibagi jumlah lahir hidup dikali 1.000	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
		3 Prevalensi stunting	Balita Stunting dibagi balita terentry di EPPGBM dikali 100%	Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
		4 Angka	Jumlah penduduk yang mempunyai keluhan	

			Kesakitan	kesehatan di bagi jumlah seluruh penduduk di kali 100 %	Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
--	--	--	-----------	---	--

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut seperti tersaji pada tabel diatas merupakan dasar untuk dijadikan sebagai acuan dalam menyajikan laporan kinerja pada SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut setiap tahunnya.

Kinerja Utama/Tujuan Dinas Kesehatan yaitu Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat adalah meliputi pengukuran peningkatan status kesehatan masyarakat dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut yaitu Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup, Prevalensi Gizi stunting dan Angka Kesakitan dengan kegiatan pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir dan pelayanan gizi pada balita, kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, serta pencegahan dan pengendalian penyakit, penanggungjawab Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi”.

Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa merupakan sebagian urusan pemerintahan di luar 6 (enam) urusan yang bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai urusan pemerintah pusat.

A. Tugas Pembantuan Yang di Terima Dari Pemerintah / Pemerintah provinsi

Dinas Kesehatan Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan yang dimaksud.

1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
3. Program, Kegiatan dan Pelaksanaan
4. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan
5. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
6. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
7. Permasalahan dan Solusi

B. Tugas Pembantuan Yang diberikan

Dinas Kesehatan Tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan yang dimaksud.

1. Dasar Hukum
2. Urusan Pemerintahan yang ditugaspembantuankan
3. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan

4. Sarana dan Prasarana

C. Tugas, Fungsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut berdasar Peraturan Bupati Tanah Laut No. 67 Tahun 2016. Sedangkan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- 1. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- 2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan.
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan.
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan.
 - d. pelaksanaan administrasi dinas.
 - e. pembinaan UPT Dinas.
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Evaluasi pengukuran kinerja tahun 2024 berdasarkan target sasaran Renstra Tahun 2024, pada umumnya dapat terealisasi semuanya, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2024		
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak serta gizi masyarakat	1.Persentase Ibu Hamil yang dilayani sesuai Standar	100%	70,3%	70,3%
		2.Persentase ibu bersalin yang dilaya ni sesuai Standar	100%	99,7%	99,7%
		3.Persentase Bayi Baru Lahir yang dilayani sesuai Standar	100%	84,35%	84,35%

		4.Persentase Balita yang mendapat pelayanan gizi sesuai Standar	100%	84,6%	84,6%
2	Meningkatnya Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	1.Persentase Rumah Tangga berPHBS	60%	92,3%	92,3%
		2.Persentase Desa yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Kesehatan Lingkungan	1.Persentase desa STBM	100%	72%	72%
		2.Persentase TTU yang memenuhi syarat Kesehatan	80%	77%	77%
		3.Persentase TPM yang memenuhi Syarat Kesehatan	62%	34%	34%
4	Meningkatnya Kesehatan Kerja dan Olah Raga	1.Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja	100%	100%	100%
		2.Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Olah Raga	100%	22,7%	22,7%
5	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	3.Persentase orang dengan penyakit Tidak Menular yang dilayani sesuai standar	234.462	61.917	26,4%
		4.Persentase Desa bebas KLB Penyakit Menular	100%	2 desa	1,48%
		5.Persentase Desa Universal Child Immunization (UCI)	100%	121 desa UCI	89,6
6	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	1.Persentase fasilitas Kesehatan yang terakreditasi Utama	100%	100%	100%
		2.Persentase Pelayanan kegawat daruratan oleh	100%	100%	100%

		Public Service Center (PSC)			
		3.Persentase Fasilitas Kesehatan yang berstatus BLUD	100%	100%	100%
		4.Persentase Jumlah Kelompok Asuhan Mandiri Tanaman Obat Keluarga (Asman TOGA) di Desa.	56%	100%	100%
		5.Persentase penduduk miskin yang menjadi peserta JKN	95%	99,91%	99,91%
7	Meningkatkan Fasilitas Pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai Standar.	70%	70,71%	70,71%
		2.Persentase Puskesmas dengan alat Kesehatan yang standar	70%	53%	53%
		3.Persentase obat dan BMHP yang sesuai Formularium Nasional	95%	98%	98%
		4.persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar	100%	100%	100%
8	Meningkatnya pelayanan administrasi dan Dukungan Operasional Perkantoran	1.Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran dengan baik dan sesuai aturan	100%	100%	100%
		2.Persentase Sarana Prasarana Perkantoran sesuai standar	100%	100%	100%
		3.Persentase Pelayanan Kepegawaian sesuai aturan	100%	100%	100%
		4.Persentase Pencatatan dan	100%	100%	100%

		Pelaporan Keuangan sesuai standar			
		5.Persentase Pencatatan aset sesuai standar	100%	100%	100%
		6.Nilai Laporan Akuntabilitas kinerja Pemerintah (LAKIP)	81,50	81,50	100%

Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dari Anggaran Rp. 459.181.138.752 terealisasi sebesar Rp 420.919.789.581 (91,7%), anggaran pendapatan daerah dari hasil Retribusi Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Dinas Kesehatan di Kabupaten Tanah Laut adalah dari target Rp 100.260.140.719,- terealisasi Rp 99.147.849.694,38 (98,89%) (LRA versi SIPD)

Untuk masa mendatang, kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut akan terus ditingkatkan, dengan melakukan beberapa hal, antara lain:

1. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran di lingkup Dinas Kesehatan, serta dukungan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan capaian indikator kinerja utama dan sasaran strategis bidang kesehatan;
2. Kerjasama Lintas Sektor dan Lintas program perlu ditingkatkan untuk pencapaian kinerja yang optimal;
3. Melakukan inovasi anggaran dan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai aturan yang berlaku untuk terus memberikan dan meningkatkan standar pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat serta mencapai target indikator kinerja utama dan sasaran strategis Dinas Kesehatan untuk mendukung keberhasilan visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Bidang Urusan Kesehatan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada bidang kesehatan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar pada bidang kesehatan meliputi:

Tabel 4.1 Jenis Pelayanan Dasar SPM Pada Bidang Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Pernyataan Standar
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Sesuai standar pelayanan antenatal	Ibu hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan	Ibu bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Bayi baru lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
4	Pelayanan kesehatan balita	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita	Balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar	Anak pada usia pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
6	Pelayanan kesehatan	Sesuai standar skrining	Warga Negara Indonesia usia	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun

	pada usia produktif	kesehatan usia produktif	15 s.d 59 tahun	mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke Atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Penderita hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Penderita Diabetes Melitus	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
11	Pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (TB)	Sesuai standar pelayanan kesehatan Tuberkulosis (TB)	Orang dengan Tuberkulosis (TB)	Setiap orang dengan Tuberkulosis (TB) mendapatkan pelayanan Tuberkulosis (TB) sesuai standar
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien Tuberkulosis (TB), pasien IMS, waria/ transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien Tuberkulosis (TB), pasien IMS, waria/ transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar

			pemasyaraka tan)	
--	--	--	---------------------	--

4.1.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024 dapat diuraikan sebagaimana berikut:

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil kepada semua ibu hamil di wilayah Kabupaten/ Kota tersebut kurun waktu kehamilan. Berikut target pelayanan kesehatan ibu hamil tahun 2024:

Tabel 4.2 Target Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tahun 2024

No	Indikator	Target
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%
	Jumlah ibu hamil yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut kurun waktu 1 tahun	

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di wilayah kerjanya kurun waktu satu tahun. Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan/ Dokter/ Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi. Berikut target pelayanan kesehatan ibu bersalin tahun 2024 :

Tabel 4.3 Target Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Tahun 2024

No	Indikator	Target
1	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%
	Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut kurun waktu 1 tahun	

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir merupakan pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan/ perawat/ Dokter/ Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR). Berikut target pelayanan kesehatan bayi baru lahir tahun 2024 :

Tabel 4.4 Target Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Tahun 2024

No	Indikator	Target
1	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
	Jumlah semua bayi baru lahir yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut kurun waktu 1 tahun	

d. Pelayanan Kesehatan Balita

Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan/ Perawat/ Dokter/ DLP/ Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM. Pelayanan kesehatan, meliputi Penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran Panjang/ tinggi badan minimal 2 kali setahun, pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun, dan pemberian imunisasi dasar lengkap. Berikut target pelayanan kesehatan balita tahun 2024 :

Tabel 4.5 Target Pelayanan Kesehatan Balita Tahun 2024

No	Indikator	Target
1	Pelayanan kesehatan anak	100%
	Jumlah balita 0-59 tahun yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut kurun waktu 1 tahun	

e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah penjangkaran kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, minimal satu kali pada kelas 1 dan kelas 7 yang dilakukan oleh

Puskesmas, standar pelayanan penjangkaran kesehatan adalah pelayanan yang meliputi penilaian status gizi (tinggi badan, berat badan, tanda klinis anemia), penilaian tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi dan napas), penilaian kesehatan gigi dan mulut, penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster snellen, penilaian ketajaman indera pendengaran dengan garputala. Berikut target pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar tahun 2024 :

Tabel 4.6 Target Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Tahun 2024

No	Indikator	Target
1	Pelayanan kesehatan pada usia	100%
	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut kurun waktu 1 tahun ajaran	

f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Setiap warga negara Indonesia usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pelayanan skrining diantaranya adalah deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan memeriksa tinggi badan dan berat badan serta lingkar perut, deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai pencegahan primer deteksi kemungkinan diabetes melitus menggunakan tes cepat gula darah, deteksi gangguan mental emosional dan perilaku. Berikut target pelayanan kesehatan pada usia produktif tahun 2024 :

Tabel 4.7 Target Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Tahun 2024

No	Indikator	Target
1	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%
	Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut kurun waktu 1 tahun	

g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan minimal dilakukan sekali setahun. Lingkup skrining kesehatan adalah deteksi hipertensi, dengan mengukur tekanan darah, deteksi diabetes melitus dengan pemeriksaan kadar gula darah, deteksi kadar kolesterol dalam darah, deteksi gangguan mental emosional dan perilaku, termasuk kepikunan menggunakan *Mini Cog* atau *Mini Mental State Examination* (MMSE)/ Tes Mental Mini atau *Abreviated Mental Test* (AMT) dan *Geriatric Depression Scale* (GDS). Berikut target pelayanan kesehatan pada usia lanjut tahun 2023 :

Tabel 4.8 Target Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Tahun 2024

No	Indikator	Target
1	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%
	Jumlah semua penduduk berusia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut kurun waktu 1 tahun	

h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Setiap penderita hipertensi dengan sasaran penduduk usia 15 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Capaian kinerja pemerintah Kabupaten/ Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya kurun waktu satu tahun. Berikut capaian pelayanan kesehatan penderita hipertensi tahun 2024 :

Tabel 4.9 Target Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Tahun 2024

No	Indikator	Target
1	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%
	Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan prevalensi Kabupaten/ Kota kurun waktu 1 tahun pada tahun yang sama	

i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)

Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotif dan preventif di FKTP.

Pelayanan kesehatan diberikan kepada penyandang DM di FKTP sesuai standar meliputi 4 (empat) pilar penatalaksanaan sebagai berikut :

- 1) Edukasi
- 2) Aktifitas fisik
- 3) Terapi nutrisi medis
- 4) Intervensi farmakologis

Berikut target pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus tahun 2023 :

Tabel 4.10 Target Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Tahun 2024

No	Indikator	Target
1	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100%
	Jumlah penyandang Diabetes Melitus berdasarkan angka prevalensi diabetes melitus nasional di wilayah kerja kurun waktu 1 tahun pada tahun yang sama	

j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat adalah pelayanan promotif preventif yang bertujuan meningkatkan kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan, pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi edukasi dan evaluasi tentang tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegah tindakan pemasungan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana, dan/atau tindakan kebersihan diri ODGJ berat. Berikut target pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat tahun 2024 :

Tabel 4.11 Target Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Tahun 2024

No	Indikator	Target
1	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)	100%
	Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota kurun waktu 1 tahun yang sama	

k. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TB)

Pelayanan tuberkulosis sesuai standar adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan TB yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan di FKTL baik pemerintah maupun swasta. Prinsip pelayanan TB adalah penemuan orang dengan TB sedini mungkin, ditatalaksana sesuai standar sekaligus pemantauan hingga sembuh atau “TOSS TB” (Temukan, Obati Sampai Sembuh). Berikut target pelayanan kesehatan orang dengan TB tahun 2024 :

Tabel 4.12 Target Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB Tahun 2024

No	Indikator	Target
1	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100%
	Jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja kab/kota kurun waktu 1 tahun yang sama	

l. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV

Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP (Puskesmas dan jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta di lapas/rutan narkoba. Berikut target pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV tahun 2024 :

Tabel 4.13 Target Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Tahun 2024

No	Indikator	Target
1	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko	100%
	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun yang sama	

4.1.3 Realisasi

Realisasi atau pencapaian pelayanan dasar SPM pada bidang kesehatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.14 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Tahun 2024

No	Kecamatan	Rumah Sakit/ Puskesmas	Jumlah Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas	Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar		
				JUMLAH	%	Ket
1	Panyipatan	Panyipatan	1.498	1424	95,06%	
		Batakan	1.200	750	54,50%	
2	Jorong	Jorong	1.414	863	61,03%	
		Asam -Asam	1.277	1000	27,49%	
3	Batu Ampar	Tajau Pecah	1.494	1177	78,78%	
		Durian Bungkok	1.515	1224	80,79%	
4	Kintap	Kintap	2.048	2.048	100,00%	
		Sei Cuka	1.113	1.113	100,00%	
5	Pelaihari	Pelaihari	3.097	3.097	100,00%	
		Sei Riam	427	427	100,00%	
		Angsau	1991	1991	100,00%	
		Panggung	2445	2445	100,00%	
6	Bajuin	Tanjung Habulu	688	550	46,95%	
		Tirta Jaya	1.264	1048	82,91%	

7	Takisung	Takisung	3.713	3120	84,03%	
8	Bati – Bati	Bati – Bati	922	910	98,70%	
		Kait - Kait	1.253	980	78,21%	
		Bentok Kampung	1.851	1689	91,25%	
9	Tambang Ulang	Tambang Ulang	1.823	1596	87,55%	
10	Kurau	Kurau	389	340	52,70%	
		Padang Luas	1.026	900	60,04%	
11	Bumi Makmur	Bumi Makmur	1.485	1050	61,95%	
J u m l a h			33.933	29.742	87,65%	

Tabel 4.15 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Tahun 2024

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	TARGET	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI		
				SASARAN	CAPAIAN	%
1	Panyipatan	Panyipatan	100%	970	687	70,8%
		Batakan	100%	1.033	891	86,3%
2	Jorong	Jorong	100%	1.125	583	51,8%
		Asam -Asam	100%	1.618	821	39,7%
3	Batu Ampar	Tajau Pecah	100%	1.000	1719	171,9%
		Durian Bungkok	100%	1.203	962	80,0%
4	Kintap	Kintap	100%	2.140	2061	96,3%
		Sei Cuka	100%	1.280	1147	89,6%
5	Pelaihari	Pelaihari	100%	2.382	1796	75,4%
		Sei Riam	100%	544	560	102,9%
		Angsau	100%	2.121	1404	66,2%
		Panggung	100%	1.189	1335	112,3%
6	Bajuin	Tanjung Habulu	100%	547	554	101,3%
		Tirta Jaya	100%	990	1365	137,9%
7	Takisung	Takisung	100%	2.587	2882	111,4%
8	Bati - Bati	Bati - Bati	100%	1.428	1441	100,9%
		Kait - Kait	100%	647	495	76,5%
		Bentok Kampung	100%	1.473	1404	95,3%
9	Tambang Ulang	Tambang Ulang	100%	1.464	1028	70,2%
10	Kurau	Kurau	100%	305	210	68,9%
		Padang Luas	100%	814	1023	125,7%
11	Bumi Makmur	Bumi Makmur	100%	1.102	836	75,9%
Jumlah			100%	27.962	25.204	90,1%

Tabel 4.16 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Tahun 2024

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	TARGET	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS		
				SASARAN	CAPAIAN	%
1	Panyipatan	Panyipatan	100%	149	149	100%
		Batakan	100%	158	158	100%
2	Jorong	Jorong	100%	173	173	100%
		Asam -Asam	100%	248	248	100%
3	Batu Ampar	Tajau Pecah	100%	153	153	100%
		Durian Bungkok	100%	184	184	100%
4	Kintap	Kintap	100%	328	328	100%
		Sei Cuka	100%	196	196	100%
5	Pelaihari	Pelaihari	100%	365	365	100%
		Sei Riam	100%	84	84	100%
		Angsau	100%	325	325	100%
		Panggung	100%	182	182	100%
6	Bajuin	Tanjung Habulu	100%	84	84	100%
		Tirta Jaya	100%	152	152	100%
7	Takisung	Takisung	100%	397	397	100%
8	Bati - Bati	Bati - Bati	100%	219	219	100%
		Kait - Kait	100%	99	99	100%
		Bentok Kampung	100%	226	226	100%
9	Tambang Ulang	Tambang Ulang	100%	224	224	100%
10	Kurau	Kurau	100%	47	47	100%
		Padang Luas	100%	125	125	100%
11	Bumi Makmur	Bumi Makmur	100%	169	169	100%
Jumlah			100%	4.287	4.287	100%

Tabel 4.17 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Tahun
2024

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	TARGET	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)		
				SASARAN	CAPAIAN	%
1	Panyipatan	Panyipatan	100%	17	100,0%	17
		Batakan	100%	21	100,0%	21
2	Jorong	Jorong	100%	21	100,0%	21
		Asam -Asam	100%	32	100,0%	32
3	Batu Ampar	Tajau Pecah	100%	19	100,0%	19
		Durian Bungkok	100%	22	100,0%	22
4	Kintap	Kintap	100%	42	100,0%	42
		Sei Cuka	100%	23	100,0%	23
5	Pelaihari	Pelaihari	100%	42	100,0%	42
		Sei Riam	100%	10	100,0%	10
		Angsau	100%	39	100,0%	39
		Panggung	100%	19	100,0%	19
6	Bajuin	Tanjung Habulu	100%	10	100,0%	10
		Tirta Jaya	100%	18	100,0%	18
7	Takisung	Takisung	100%	46	100,0%	46
8	Bati - Bati	Bati - Bati	100%	26	100,0%	26
		Kait - Kait	100%	26	100,0%	26
		Bentok Kampung	100%	11	100,0%	11
9	Tambang Ulang	Tambang Ulang	100%	26	100,0%	26
10	Kurau	Kurau	100%	5	100,0%	5
		Padang Luas	100%	15	100,0%	15
11	Bumi Makmur	Bumi Makmur	100%	20	100,0%	20
Jumlah			100%	510	510	100%

Tabel 4.18 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB Tahun 2024

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	TARGET	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS		
				SASARAN	CAPAIAN	%
1	Panyipatan	Panyipatan	100%	151	158	104,85%
		Batakan	100%	184	209	113,59%
2	Jorong	Jorong	100%	188	149	79,26%
		Asam -Asam	100%	271	207	76,38%
3	Batu Ampar	Tajau Pecah	100%	167	117	70,07%
		Durian Bungkok	100%	201	125	62,20%
4	Kintap	Kintap	100%	359	114	31,75%
		Sei Cuka	100%	214	58	27,1%
5	Pelaihari	Pelaihari	100%	392	411	104,64%
		Sei Riam	100%	97	154	158,76%
		Angsau	100%	355	222	62,54%
		Panggung	100%	199	157	78,89%
6	Bajuin	Tanjung Habulu	100%	91	45	49,45%
		Tirta Jaya	100%	166	104	62,65%
7	Takisung	Takisung	100%	434	346	79,72%
8	Bati – Bati	Bati – Bati	100%	239	154	64,44%
		Kait – Kait	100%	108	106	98,15%
		Bentok Kampung	100%	247	226	91,5%
9	Tambang Ulang	Tambang Ulang	100%	245	242	98,78%
10	Kurau	Kurau	100%	51	43	84,31%
		Padang Luas	100%	136	127	93,38%
11	Bumi Makmur	Bumi Makmur	100%	184	219	119,02%
Jumlah			100%	4.679	3.693	78,9%

Tabel 4.19 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Tahun
2024

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	TARGET	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV		
				SASARAN	CAPAIAN	%
1	Panyipatan	Panyipatan	100%	297	277	93,3%
		Batakan	100%	319	335	105,0%
2	Jorong	Jorong	100%	345	285	82,6%
		Asam -Asam	100%	483	469	97,1%
3	Batu Ampar	Tajau Pecah	100%	309	318	102,9%
		Durian Bungkok	100%	365	304	83,3%
4	Kintap	Kintap	100%	623	832	133,5%
		Sei Cuka	100%	386	178	46,1%
5	Pelaihari	Pelaihari	100%	687	580	84,4%
		Sei Riam	100%	184	125	67,9%
		Angsau	100%	912	1019	111,7%
		Panggung	100%	362	439	121,3%
6	Bajuin	Tanjung Habulu	100%	183	157	85,8%
		Tirta Jaya	100%	304	293	96,4%
7	Takisung	Takisung	100%	742	833	112,3%
8	Bati - Bati	Bati - Bati	100%	427	382	89,5%
		Kait - Kait	100%	211	166	78,7%
		Bentok Kampung	100%	440	376	85,5%
9	Tambang Ulang	Tambang Ulang	100%	434	263	60,6%
10	Kurau	Kurau	100%	116	86	74,1%
		Padang Luas	100%	258	188	72,9%
11	Bumi Makmur	Bumi Makmur	100%	334	352	105,4%
Jumlah			100%	8.721	8.257	94,6%

Tabel 4.20 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tahun 2024

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	TARGET	PELAYANAN KESEHATAN		
				IBU HAMIL		
				SASARAN	CAPAIAN	%
1	Panyipatan	Panyipatan	100%	217	112	52,1%
		Batakan	100%	231	153	66,8%
2	Jorong	Jorong	100%	251	175	70,0%
		Asam -Asam	100%	364	287	79,5%
3	Batu Ampar	Tajau Pecah	100%	223	134	60,4%
		Durian Bungkok	100%	270	169	62,8%
4	Kintap	Kintap	100%	480	362	75,9%
		Sei Cuka	100%	288	234	81,8%
5	Pelaihari	Pelaihari	100%	532	522	98,7%
		Panggung	100%	121	69	57,5%
		Sei Riam	100%	474	349	74,1%
		Angsau	100%	266	157	59,5%
6	Bajuin	Tanjung Habulu	100%	122	85	70,2%
		Tirta Jaya	100%	221	131	59,8%
7	Takisung	Takisung	100%	578	337	58,6%
8	Bati – Bati	Bati – Bati	100%	319	220	69,4%
		Kait - Kait	100%	144	76	53,1%
		Bentok Kampung	100%	331	219	66,6%
9	Tambang Ulang	Tambang Ulang	100%	327	282	86,8%
10	Kurau	Kurau	100%	68	42	62,7%
		Padang Luas	100%	184	96	52,7%
11	Bumi Makmur	Bumi Makmur	100%	246	160	65,6%
Jumlah			100%	6.257	4.371	69,8%

Tabel 4.21 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Tahun 2024

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	TARGET	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR		
				SASARAN	CAPAIAN	%
1	Panyipatan	Panyipatan	100%	204	156	76,5%
		Batakan	100%	217	160	73,7%
2	Jorong	Jorong	100%	237	206	86,9%
		Asam -Asam	100%	346	325	93,9%
3	Batu Ampar	Tajau Pecah	100%	211	157	74,4%
		Durian Bungkok	100%	257	207	80,5%
4	Kintap	Kintap	100%	456	445	97,6%
		Sei Cuka	100%	273	259	94,9%
5	Pelaihari	Pelaihari	100%	503	512	101,8%
		Panggung	100%	250	174	69,6%
		Sei Riam	100%	114	78	68,4%
		Angsau	100%	448	408	91,1%
6	Bajuin	Tanjung Habulu	100%	115	86	74,8%
		Tirta Jaya	100%	208	167	80,3%
7	Takisung	Takisung	100%	546	387	70,9%
8	Bati – Bati	Bati – Bati	100%	301	235	78,1%
		Kait – Kait	100%	136	90	66,2%
		Bentok Kampung	100%	315	284	90,2%
9	Tambang Ulang	Tambang Ulang	100%	308	272	88,3%
10	Kurau	Kurau	100%	64	54	84,4%
		Padang Luas	100%	175	138	78,9%
11	Bumi Makmur	Bumi Makmur	100%	232	190	81,9%
Jumlah			100%	5.916	4.990	84,3%

Tabel 4.22 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Tahun 2024

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	TARGET	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN		
				SASARAN	CAPAIAN	%
1	Panyipatan	Panyipatan	100%	215	158	73.5%
		Batakan	100%	229	167	72.9%
2	Jorong	Jorong	100%	250	219	87.6%
		Asam -Asam	100%	361	332	92.0%
3	Batu Ampar	Tajau Pecah	100%	222	159	71.6%
		Durian Bungkok	100%	269	208	77.3%
4	Kintap	Kintap	100%	477	451	94.5%
		Sei Cuka	100%	286	265	92.7%
5	Pelaihari	Pelaihari	100%	529	519	98.1%
		Panggung	100%	264	77	64.2%
		Sei Riam	100%	120	410	87.0%
		Angsau	100%	471	178	67.4%
6	Bajuin	Tanjung Habulu	100%	121	87	71.9%
		Tirta Jaya	100%	219	162	74.0%
7	Takisung	Takisung	100%	575	389	67.7%
8	Bati - Bati	Bati - Bati	100%	317	237	74.8%
		Kait - Kait	100%	143	91	63.6%
		Bentok Kampung	100%	329	289	87.8%
9	Tambang Ulang	Tambang Ulang	100%	325	263	80.9%
10	Kurau	Kurau	100%	67	56	83.6%
		Padang Luas	100%	182	138	75.8%
11	Bumi Makmur	Bumi Makmur	100%	244	198	81.1%
Jumlah			100%	6.215	5.053	81,3%

Tabel 4.23 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan
Pencapaian SPM Pelayanan Balita Tahun 2024

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	TARGET	PELAYANAN KESEHATAN BALITA		
				SASARAN	CAPAIAN	%
1	Panyipatan	Panyipatan	100%	1041	906	87,0%
		Batakan	100%	1108	721	65,1%
2	Jorong	Jorong	100%	1208	1073	88,8%
		Asam -Asam	100%	1742	1274	73,1%
3	Batu Ampar	Tajau Pecah	100%	1073	809	75,4%
		Durian Bungkok	100%	1294	1164	90,0%
4	Kintap	Kintap	100%	2303	2574	111,8%
		Sei Cuka	100%	1378	1431	103,8%
5	Pelaihari	Pelaihari	100%	2558	2403	93,9%
		Panggung	100%	1277	988	77,4%
		Sei Riam	100%	583	461	79,1%
		Angsau	100%	2278	1752	76,9%
6	Bajuin	Tanjung Habulu	100%	587	534	91,0%
		Tirta Jaya	100%	1063	917	86,3%
7	Takisung	Takisung	100%	2780	2305	82,9%
8	Bati - Bati	Bati - Bati	100%	1534	1337	87,2%
		Kait - Kait	100%	694	562	81,0%
		Bentok Kampung	100%	1586	1204	75,9%
9	Tambang Ulang	Tambang Ulang	100%	1571	1227	78,1%
10	Kurau	Kurau	100%	327	245	74,9%
		Padang Luas	100%	877	670	76,4%
11	Bumi Makmur	Bumi Makmur	100%	1183	867	73,3%
Jumlah			100%	30.045	25.424	84,6%

Tabel 4.24 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Tahun 2024

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	TARGET	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF		
				SASARAN	CAPAIAN	%
1	Panyipatan	Panyipatan	100%	8.646	2182	25,24%
		Batakan	100%	8.657	5433	62,76%
2	Jorong	Jorong	100%	10.361	3033	29,27%
		Asam -Asam	100%	13.571	1211	8,92%
3	Batu Ampar	Tajau Pecah	100%	8.899	2663	29,92%
		Durian Bungkok	100%	10.089	4828	47,85%
4	Kintap	Kintap	100%	17.948	10739	59,83%
		Sei Cuka	100%	11.622	10720	92,24%
5	Pelaihari	Pelaihari	100%	20.472	7941	38,79%
		Sei Riam	100%	5.061	2283	45,11%
		Angsau	100%	18.282	8408	45,99%
		Panggung	100%	10.582	7657	72,36%
6	Bajuin	Tanjung Habulu	100%	5.155	1885	36,57%
		Tirta Jaya	100%	8.299	2768	33,35%
7	Takisung	Takisung	100%	22.428	20802	92,75%
8	Bati - Bati	Bati - Bati	100%	12.475	10117	81,10%
		Kait - Kait	100%	5.924	3797	64,10%
		Bentok Kampung	100%	13.108	11860	90,48%
9	Tambang Ulang	Tambang Ulang	100%	12.716	5961	46,88%
10	Kurau	Kurau	100%	2.953	2115	71,62%
		Padang Luas	100%	6.821	3044	44,63%
11	Bumi Makmur	Bumi Makmur	100%	9.481	3511	37,03%
Jumlah			100%	243.550	132.958	54,59%

Tabel 4.25 Pencapaian Indikator SPM Urusan Bidang Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Tahun 2024

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	TARGET	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR		
				SASARAN	CAPAIAN	%
1	Panyipatan	Panyipatan	100%	2.586	2.586	100,00%
		Batakan	100%	1.590	1.590	100,00%
2	Jorong	Jorong	100%	1.901	1.901	100,00%
		Asam -Asam	100%	4.486	4.486	100,00%
3	Batu Ampar	Tajau Pecah	100%	2.417	2.417	100,00%
		Durian Bungkok	100%	2.059	2.059	100,00%
4	Kintap	Kintap	100%	4.598	4.289	93,28%
		Sei Cuka	100%	3.568	3.347	93,81%
5	Pelaihari	Pelaihari	100%	5.101	5.101	100,00%
		Sei Riam	100%	689	689	100,00%
		Angsau	100%	5.559	5.559	100,00%
		Panggung	100%	1.668	1.668	100,00%
6	Bajuin	Tanjung Habulu	100%	1.505	1.505	100,00%
		Tirta Jaya	100%	1.735	1.735	100,00%
7	Takisung	Takisung	100%	5.336	4.998	93,67%
8	Bati - Bati	Bati - Bati	100%	2.984	2.984	100,00%
		Kait - Kait	100%	1.433	1.433	100,00%
		Bentok Kampung	100%	3.000	2.913	97,10%
9	Tambang Ulang	Tambang Ulang	100%	3.100	2.938	94,77%
10	Kurau	Kurau	100%	600	600	100,00%
		Padang Luas	100%	1.653	1.603	96,98%
11	Bumi Makmur	Bumi Makmur	100%	2.382	2.280	95,72%
Jumlah			100%	59.950	58.681	97,88%

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Bidang Kesehatan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.26 Alokasi Anggaran SPM Urusan Bidang Kesehatan Tahun 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN (%)
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	11.211.281.809	9.289.403.232	82,9
		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.211.281.809	9.289.403.232	82,9
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3.708.168.875	3.149.188.200	84,9
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.411.923.888	1.002.632.844	71,0
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	296.565.407	230.414.000	77,7
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.699.532.986	1.579.443.600	92,9
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.497.824.550	1.099.375.250	73,4
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	336.011.974	321.456.750	95,7
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	349.999.130	325.734.740	93,1
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	61.480.565	61.176.000	99,5
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	437.163.849	399.299.300	91,3

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	CAPAIAN (%)
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	152.570.425	53.199.500	34,9
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.051.270.006	923.732.048	87,9
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	208.770.154	143.751.000	68,9

4.1.5 Dukungan Personil

Tabel 4.27 Dukungan Personil/Ketenagaan Puskesmas SPM Urusan Bidang Kesehatan Tahun 2024

No	Puskesmas	Jumlah Tenaga Kesehatan								
		Dokter	Dokter Gigi	Pera wat	Bidan	Keseha tan Masyarakat	Keseha tan Lingku ngan	Farmasi	Gizi	ATLM
1	Panyipatan	2	1	12	14	1	2	1	2	2
2	Batakan	1	1	12	11	2	2	1	2	2
3	Jorong	2	1	10	12	1	2	1	2	2
4	Asam - Asam	2	2	11	15	1	3	1	2	2
5	Tajau Pecah	2	1	17	14	2	3	1	2	2
6	Kintap	1	1	12	14	2	2	1	2	3
7	Sei Cuka	1	1	6	14	1	2	1	1	1
8	Pelaihari	3	1	10	16	2	2	2	2	3
9	Sei Riam	2	1	10	9	1	1	1	2	1
10	Angsau	4	2	11	16	1	1	1	2	3
11	Panggung	3	1	4	12	1	1	1	1	1
12	Tanjung Habulu	2	1	10	11	1	2	1	2	2
13	Tirta Jaya	1	1	10	15	1	2	1	2	1
14	Takisung	2	1	18	19	1	3	1	3	4
15	Bati - Bati	2	1	14	14	2	1	1	2	3
16	Kait - Kait	1	1	7	9	1	2	1	2	1
17	Tambang Ulang	2	1	13	13	1	2	1	1	1
18	Kurau	2	1	12	7	3	3	1	3	1
19	Padang Luas	1	1	9	12	1	1	1	3	2
20	Bumi Makmur	2	1	7	15	3	1	1	3	1
21	Bentok Kampung	2	1	9	9	2	2	1	2	2
22	Durian Bungkuk	2	1	6	12	1	1	1	2	3
	Jumlah	42	24	230	283	32	41	23	45	43

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.28 Permasalahan dan Solusi Pencapaian SPM Urusan Bidang Kesehatan Tahun 2024

No	Permasalahan	Solusi
1.	Pendataan Sasaran SPM terlalu besar, semua siklus kehidupan, mulai dari ibu hamil, bayi, Balita, Usia Produktif, usia Lanjut dan kematian	Pendataan sasaran bisa mengoptimalkan Kader Kesehatan tetapi mesti harus ditindaklanjuti oleh tenaga kesehatan. Bisa Menggunakan data sasaran melalui LS seperti Dukcapil dan BPS
2.	Terbatasnya SDM di fasilitas Pelayanan Kesehatan	1. Optimalisasi Bidan desa dan tenaga kesehatan lainnya serta Kader Kesehatan. 2. Kerjasama dan berkoordinasi dengan RS swasta, Klinik swasta dan perorangan/ praktek dokter/bidan 3. Usulan Tenaga Kesehatan melauai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 4. Rekrutmen tenaga Kontrak yang dibiayai Bantuan Operasional kesehatan sesuai dengan juknis yang berlaku.
3.	Terbatasnya perlatan kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang menunjang pada kegiatan Pelayanan SPM	1. Memberikan keleluasaan Puskesmas dalam pembelian alat kesehatan sederhana dan bahan medis habis pakai/ <i>rapid test</i> dengan mempercepat proses puskesmas BLUD. 2. Puskesmas bisa menganggarkan perlatan kesehatan sederhana dan bahan medis habis pakai melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat. 3. Mempercepat proses pengadaan alat kesehatan dan BMHP. 4. Mengusulkan alat kesehatan melalui dana APBN (DAK)
4.	Juknis pada Pencapaian tiap indikator SPM terlalu banyak persyaratannya	Usulan peninjauan ulang Juknis SPM ke kementerian Kesehatan
5.	Ketidakjelasan kebutuhan biaya penganggaran alat kesehatan, BMHP maupun sumber daya kesehatan lainnya yang mendukung pencapaian SPM	Koordinasi lintas program untuk membuat Rencana Kebutuhan Belanja dalam pencapaian SPM

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun. Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 selain merupakan kewajiban perundang-undangan, maka tujuan pokok penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 ini adalah sebagai media untuk mengkomunikasikan dan menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tanah Laut selama tahun 2024, termasuk capaian kinerjanya.

Dari hasil kinerja yang dilaporkan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024, dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan yang telah dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan, pada umumnya berjalan dengan baik dan lancar.

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Capaian realisasi anggaran pendapatan daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut secara lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang sah. Alokasi Anggaran Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar Rp. 100.260.140.719 dengan realisasi sebesar Rp. 99.147.849.694,38 atau 98,89%

2. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal Alokasi anggaran belanja daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar Rp. 459.181.138.752,47 dengan Realisasi sebesar Rp. 420.833.206.771 ,00 atau 91,65%.
3. Target Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan secara nasional dapat tercapai dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2024 melalui dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 serta dokumen Rencana Strategis perangkat daerah pengampu SPM. Dari pelaksanaan tersebut tahun 2024 diperoleh hasil Tuntas Utama (93,93%).
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut kurun waktu 2024 tidak melaksanakan tugas pembantuan dan urusan Bersama dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Dinas Kesehatan mempunyai fungsi, perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan, pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan, pelaksanaan administrasi dinas, pembinaan UPT Dinas, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat kondisi yang belum sesuai dengan seluruh harapan, tuntutan dan kebutuhan masyarakat secara optimal. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut bersama – sama dengan segenap komponen pembangunan terus bekerja sama untuk mewujudkan harapan – harapan dari seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Kedepannya akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan pelayanan pada tahun-tahun mendatang.

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan pada tahun 2024 dapat berjalan baik, dengan manfaat dan dampak positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Tanah Laut.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 ini disampaikan untuk penyempurnaan dan perbaikan pembangunan kedepan di Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari, 20 Januari 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanah Laut



dr. Hj. Isna Farida, M.Kes
NIP. 19740612 200501 2 016